

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

SEKRETARIAT
DPRD



**Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRD
Tahun 2025 - 2029**



**Pemerintah Kabupaten Cianjur
Sekretariat DPRD**

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telp. (0263) 272165, Fax. (0263) 272159 Cianjur



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Telp. (0263) 272165 Fax. (0263) 272159 Cianjur

KEPUTUSAN SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : B/000.8.1.1/10/SETWAN/09/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
 - b. bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur merupakan dokumen perencanaan untuk Periode Tahun 2025-2029, yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan, yang meliputi strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realistis dengan tetap memproyeksikan perkembangan di masa depan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana Diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Penanggungjawab : Sekretaris DPRD
- Ketua : Kepala Bagian Program dan Keuangan
- Wakil Ketua 1 : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- Wakil Ketua 2 : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum
- Anggota : 1. JF Perencana Ahli Muda
2. JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
4. JF Perisalah Legislatif Ahli Muda
5. Kepala Subbagian Protokol

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Inventarisasi data-data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;
2. Mengkoordinasikan dengan Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur untuk bahan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;
3. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;

4. Monitoring terhadap penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2029;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIAT DPRD KAB. CIANJUR

SEKRETARIS,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025-2029
 NOMOR : B/000.8.1.1/10/SETWAN/09/2025
 TANGGAL : 19 MEI 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si	19690304 199503 1 007	Penanggung Jawab
2	ERWIN JULFRIANSYAH, S.IP	19740712 199403 1 002	Ketua
3	NENDEN RASPATI ROHANIAWATI, SH	19701212 200801 2 005	Wakil Ketua 1
4	IIN SOLIHIN, ST, M.Si	19670915 200501 1 008	Wakil Ketua 2
5	EJEN JENAL MUTAKIN, SH, MH	19720117 200901 1 003	Sekretaris
6	ITA FUSFITAWATI, SE	19870604 201001 2 007	Anggota
7	Hj. AMI ROHMANIYATI, S.IP	19671105 199303 2 007	Anggota
8	SAEFUL MU'MIN, SE	19780421 200501 1 008	Anggota
9	NANI NURAENI, SH	19690225 200801 2 003	Anggota
10	ARIS MUHAMMAD KARDIYANA, SH	19700527 200501 1 008	Anggota
11	ROHMAH, SE	19780211 200701 2 019	Anggota

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIAT DPRD KAB. CIANJUR
SEKRETARIS,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690304 199503 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja lima tahun ke depan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program guna menetapkan arah perkembangan masa depan. Keberadaan rencana strategis ini dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD dalam menetapkan skala prioritas program/ kegiatan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program/ kegiatan di bidang unsur pendukung urusan pemerintahan.

Semoga dengan pendekatan rencana strategis yang sinergis, diharapkan Sekretariat DPRD dapat lebih mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Cianjur, 12 September 2025

Sekretariat DPRD Kab. Cianjur
Sekretaris,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	5
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	12
III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	15
3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	15
3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	15
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	17
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	17
IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	18
V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	14
3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	16
3.2. Penahapan Renstra PD	17
3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	17
4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD	19
4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	29
4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	43
4.4. Indikator Kinerja Utama PD	44
4.5. Indikator Kinerja Kunci	44

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur	9

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Data Statistik Sektoral Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2025	46

1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat otonomi daerah memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat, serta aspirasi daerah dan masyarakat. DPRD dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga dalam hal ini tugas dan fungsinya, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD. Agar fungsi DPRD dapat dilaksanakan secara optimal, maka Sekretariat DPRD sudah semestinya memiliki perencanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Perencanaan ditempuh berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja). Paradigma Perencanaan Pembangunan menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up*, dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten, kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Rencana Strategis merupakan perencanaan untuk pengukuran kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai dasar pelaksanaan kinerja selama periode lima tahun yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu memenuhi harapan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dituntut untuk dapat dengan tanggap, cepat, dan cermat dalam merespon aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang berkualitas kepada anggota DPRD menjadi penting guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan peran

strategisnya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan terhadap DPRD merupakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

Untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka diperlukan perencanaan yang konsisten dan terukur. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat DPRD melaksanakan penyusunan Rencana Strategis.

Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realistis dengan tetap memproyeksikan perkembangan di masa depan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap kelembagaan pelaksanaan tugas DPRD, sehingga meningkat pula pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan renstra dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029. Sehingga penyusunan Renstra tahun 2025-2029 merupakan fondasi membangun dasar pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemerataan dan penataan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur;
 14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana Diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan pedoman perencanaan jangka menengah lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan arah organisasi, yaitu memberikan panduan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai organisasi dalam jangka menengah;
2. Mengoperasionalkan rencana pembangunan, yaitu menjadi acuan untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
3. Dasar perencanaan tahunan, yaitu menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja (renja) tahunan dan penganggaran;
4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja, yaitu menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan jangka menengah, sehingga memudahkan penyusunan laporan kinerja yang terukur;
6. Penguatan kapasitas kinerja, yaitu dapat mengarahkan kinerja sesuai dengan visi dan misi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi yang efektif, sehingga memperkuat kapasitas kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- | | | |
|-----|-----|---|
| BAB | I | PENDAHULUAN |
| | | 1.1. Latar Belakang |
| | | 1.2. Dasar Hukum Penyusunan |
| | | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | | 1.4. Sistematika Penulisan |
| BAB | II | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| | | 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah |
| | | 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah |
| BAB | III | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| | | 3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 |
| | | 3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 |
| | | 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 |
| | | 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 |
| BAB | IV | PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB | V | PENUTUP |

2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelembagaan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Sebagaimana organisasi birokrasi pada umumnya, struktur organisasi Sekretariat DPRD menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 1. Unsur pimpinan adalah Sekretaris;
 2. Unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Bagian;
 3. Unsur pelaksana adalah Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 1. Sekretaris
 2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 3. Bagian Umum, terdiri atas :
 - 3.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 3.2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Pelaksana
 4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 - 4.1. Subbagian Protokol
 - 4.2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Pelaksana

5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan agar meningkatnya pelayanan terhadap agenda DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, serta verifikasi pengajuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar terkelolanya dukungan administrasi keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ;
- e. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD;
- i. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Program dan Keuangan;
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Program dan Keuangan;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin penyusunan perumusan perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan, tata usaha dan kepegawaian, serta hubungan masyarakat dan dokumentasi agar terkelolanya dukungan administrasi kesekretariatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Umum;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP), pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Umum;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Umum;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

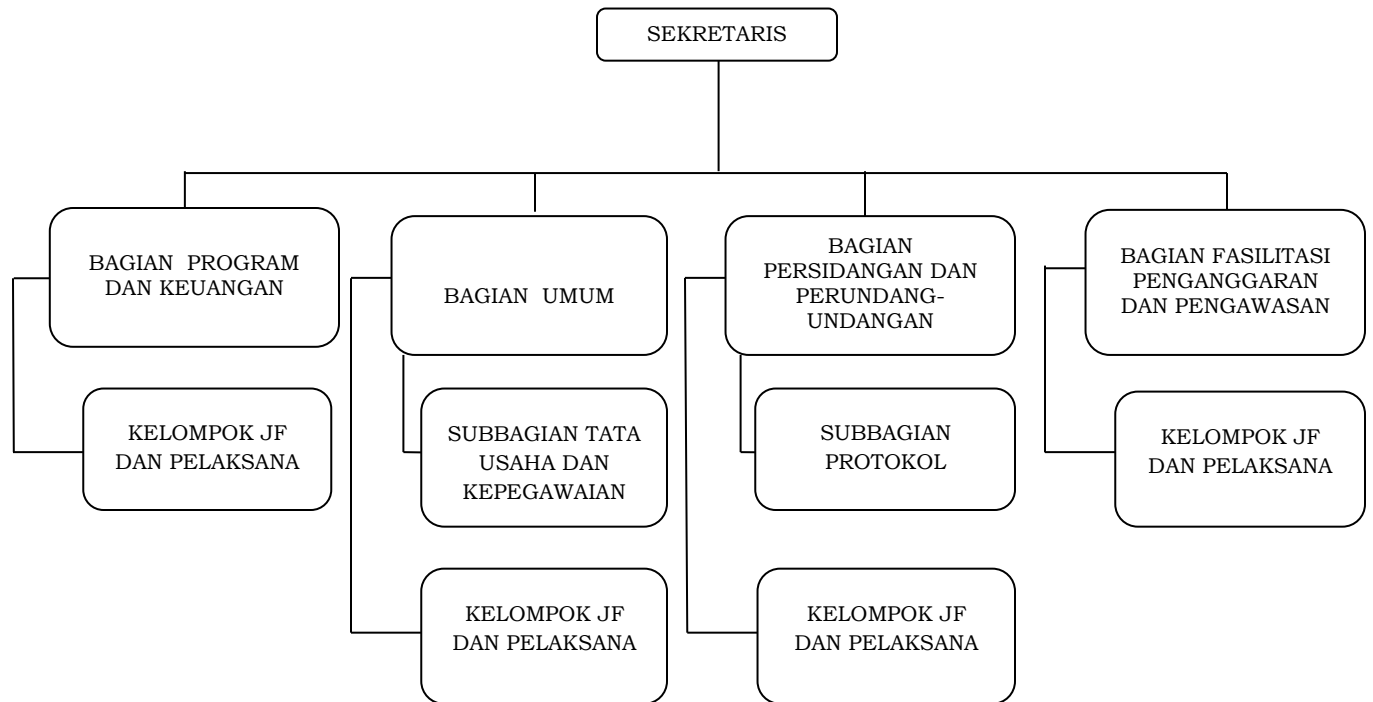
3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan agar terkelolanya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dalam bidang pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- e. Pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif dan pelaksanaan koordinasi pembahasan Raperda;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusunan risalah rapat;
- h. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- i. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);

- j. Penyelenggaraan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan fasilitasi terhadap kewenangan DPRD dalam memimpin pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta penghimpunan aspirasi masyarakat agar terkelolanya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pembahasan APBD/APBDP;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan persetujuan kerjasama daerah;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur



Sumber : Lampiran II Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 tahun 2021

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai jumlah personil sebanyak 102 (seratus dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Tahun 2025

NO.	JABATAN	JML	PANGKAT/GOL RUANG	JML	PEND. FORMAL	JML	KET
1	Sekretaris	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S2	1	
2	Kepala Bagian	4	Pembina Tk. I (IV/b)	2	S1	2	
			Pembina (IV/a)	1	S2	1	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S1	1	
3	Kasubbag/ Jabatan Fungsional	6	Penata Tk. I (III/d)	6	S2	1	
					S1	5	
4	Pelaksana/ Tenaga Kebersihan/ Pengemudi/ Tenaga Pengamanan	91	Penata Tk. I (III/d)	1	S1	1	
			Penata (III/c)	5	S1	5	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	2	SMA	2	
			Penata Muda (III/a)	4	S1	4	
			Pengatur Tk. I (II/d)	1	SMA	1	
			Pengatur (II/c)	1	D3	1	
				2	SMA	2	
			PPPK Golongan IX	11	S1	11	
			PPPK Golongan V	2	SMA	2	
			Tenaga Administrasi/ Operator Komputer	34	S1	23	
					SMA	11	
			Tenaga Ahli Fraksi	8	S1	8	
			Pengemudi	3	SMA	3	
Tenaga Pengamanan	5	SMA	5				
Tenaga Kebersihan	12	SMA	12				
	Jumlah	102		102		102	

Ket :
Keadaan s.d. tanggal 31 Agustus 2025

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya, kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2020-2024 dapat dianalisis dengan menghitung capaian indikator sasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD mampu memberikan fasilitasi yang sangat baik terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pencapaian kinerja tidak terlepas dari SDM dan anggaran yang tersedia untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator sasaran tahun 2020-2024 tidak dijadikan indikator sasaran renstra tahun 2025-2029 karena kurang mencerminkan sasaran yang *SMART* atau spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan berbasis waktu (*time-based*). Namun, nilai capaian indikator sasaran atau kinerja utama pada tahun 2024 sebagai *baseline* renstra tahun 2025-2029 dapat dikonversi menggunakan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaporkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur. Hal ini dikarenakan penghitungan indikator sasaran menggunakan rumus yang sama dengan IKM, dimana respondennya adalah anggota DPRD Kabupaten Cianjur sebanyak 50 orang. Nilai IKM tahun 2024 adalah 83,88.

Penyerapan anggaran tahun 2020 s.d 2024 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun Sekretariat DPRD mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Capaian anggaran terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,28%, sementara capaian anggaran terkecil terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 93,24%. Pada tahun 2020, penyerapan anggaran tercapai secara optimal dikarenakan adanya refocusing dan efisiensi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Sementara pada tahun 2022 capaian anggaran kurang optimal dikarenakan adanya bencana alam gempa, sehingga beberapa kegiatan DPRD tidak dapat dilaksanakan. Anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tidak dialihkan ke dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) namun menjadi SILPA (sesuai persetujuan BKAD selaku TAPD) yang diputuskan melalui rapat Badan Musyawarah DPRD. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran lebih besar dari rata-rata pertumbuhan target anggaran menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD memiliki kinerja keuangan yang baik dalam penyerapan anggaran.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja tahun 2020-2024, Sekretariat DPRD dapat secara optimal memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD sebagai legislatif. Namun meskipun demikian, pada kenyataannya fungsi legislasi DPRD belum secara optimal dapat diimplementasikan. Hal ini dikarenakan selama periode tahun 2020-2024, tidak seluruh raperda yang ditetapkan dalam propemperda dapat dibahas dan disetujui. Beberapa diantaranya ada yang sudah pada tahap pembahasan namun tidak disetujui menjadi perda. Beberapa yang lainnya bahkan tidak sampai pada tahap pembahasan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, maka Sekretariat DPRD melakukan identifikasi tantangan maupun peluang yang mungkin dihadapi dalam pengembangan pelayanan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD antara lain :
 1. Fasilitasi dalam pemenuhan fungsi legislasi DPRD agar seluruh propemperda dapat dibahas dan ditindaklanjuti
 2. Fasilitasi dalam menampung aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat ditindaklanjuti
- b. Peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya :
 1. Banyaknya undangan penawaran bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi Sekretariat DPRD agar dapat memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur
Tahun 2020-2024**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (2024)	Target IKK (2024)	Target Indikator Lainnya	Target (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)					Capaian %				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyusunan Raperda yang difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD, data diolah 2025

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Target Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Capaian (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Target Anggaran	Realisasi
1	Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	56.991.628.471	62.301.166.870	66.860.341.188	71.176.250.300	79.031.122.200	56.011.001.209	59.534.876.999	62.339.770.507	68.848.905.517	74.741.596.493	98,28	95,56	93,24	96,73	94,57	6,76%	5,94%

Sumber: Sekretariat DPRD, data diolah 2025

d. **Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD dalam memfasilitasi terwujudnya trifungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, maka kelompok sasaran pelayanan bagi Sekretariat DPRD adalah DPRD. Oleh karena itu, kinerja Sekretariat DPRD dapat tercapai secara optimal apabila DPRD memperoleh kepuasan yang optimal atas pelayanan Sekretariat DPRD. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD, keuangan DPRD, rapat, penyediaan tenaga ahli, dan fasilitasi kegiatan lainnya yang menunjang tugas dan fungsi DPRD.

Adapun fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah fasilitasi terhadap alat kelengkapan DPRD dan fraksi DPRD. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Adapun fraksi DPRD terdiri dari 8 (delapan) fraksi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Sekretariat DPRD dititikberatkan pada upaya peningkatan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yang dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPRD meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD sebagai cermin atau penjelmaan rakyat diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi dan tuntutan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, maka Sekretariat DPRD harus berupaya secara optimal agar tugas dan fungsi DPRD dapat terfasilitasi dengan sangat baik. Dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, Sekretariat DPRD dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang optimalnya fungsi legislasi DPRD	Belum optimalnya fasilitasi pembentukan peraturan daerah (Perda)	Perbedaan pemahaman antara pengusul raperda dengan tenaga ahli penyusun naskah akademik Kurang lengkapnya muatan raperda ketika dibahas oleh Pansus raperda

Capaian Kinerja Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Target					Realisasi					Capaian Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Raperda yang Dimuat dalam Propemperda	22 Raperda	22 Raperda	12 Raperda	14 Raperda	13 Raperda	22 Raperda	22 Raperda	12 Raperda	14 Raperda	13 Raperda	100	100	100	100	100
2	Raperda yang Dibahas	22 Raperda	22 Raperda	12 Raperda	14 Raperda	13 Raperda	19 Raperda	12 Raperda	12 Raperda	14 Raperda	12 Raperda	86,36	54,55	100	100	92,31
3	Raperda yang Ditetapkan menjadi Perda	19 Raperda	12 Raperda	12 Raperda	14 Raperda	12 Raperda	14 Perda	12 Perda	10 Perda	14 Perda	10 Perda	73,68	100	83,33	100	83,33

Sumber: Sekretariat DPRD, data diolah 2025

Capaian kinerja diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

1. Raperda yang Dimuat dalam Propemperda

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{jumlah raperda yang dimuat dalam Propemperda}}{\text{jumlah raperda yang diusulkan}} \times 100\%$$

2. Raperda yang Dibahas

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{jumlah raperda yang dibahas oleh Pansus raperda}}{\text{jumlah raperda yang dimuat dalam Propemperda}} \times 100\%$$

3. Raperda yang Ditetapkan menjadi Perda

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{jumlah raperda yang disetujui menjadi perda}}{\text{jumlah raperda yang dibahas}} \times 100\%$$

b. Isu Strategis

Isu Strategis adalah sebuah kondisi/ perkembangan/ peristiwa/ *trend* yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Isu strategis diperlukan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kinerja. Identifikasi isu strategis diawali dengan menganalisis pokok permasalahan yang dihadapi dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kondisi lingkungan organisasi (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan salah satu isu strategis pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 bahwa kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir, maka diperlukan perbaikan mendasar pada tatanan birokrasi (hulu) seperti peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, serta kualitas pelayanan publik dan hasil pembangunan (hilir) yang belum optimal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD perlu melakukan pembenahan pada berbagai aspek birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti peningkatan kapasitas SDM, penerapan sistem pelayanan yang inovatif dan berbasis teknologi, serta pembenahan kelembagaan agar dapat memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta bermanfaat langsung bagi masyarakat. Berikut ini isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)	Belum optimalnya fasilitasi pembentukan Perda	-	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses informasi terkait kinerja DPRD	Meningkatnya unjuk rasa dari masyarakat terkait dengan regulasi/kebijakan pemerintah	Meningkatnya unjuk rasa dari masyarakat terkait dengan kurangnya sosialisasi atas regulasi/kebijakan pemerintah terhadap masyarakat	Meningkatnya aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti

Aspirasi masyarakat diperoleh melalui reses DPRD yang dituangkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal, maka diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kebijakan program prioritas daerah.

Sosialisasi tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat/daerah juga diperlukan untuk mengurangi unjuk rasa yang timbul akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ditetapkan suatu regulasi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi, maka masyarakat dapat menerima setiap regulasi yang ditetapkan karena adanya kesamaan pemahaman.

3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Cianjur”* dengan pemaknaan Sekretariat DPRD yang profesional adalah aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang ditetapkan serta selalu fokus pada penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu misi, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, misi yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat DPRD dalam mensinergikan koordinasi dan kondusifitas hubungan kerja DPRD dengan eksekutif dan masyarakat.

Berdasarkan misi yang diemban oleh Sekretariat DPRD, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi General.

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan visi yang ingin dicapai, maka sasaran renstra Sekretariat DPRD 2025-2029 adalah meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan legislasi, budgeting dan pengawasan DPRD dengan indikator indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD. Cara menghitung indikator sasaran sama dengan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan responden adalah seluruh anggota DPRD sebanyak 50 orang, yaitu sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi General	73,93	74,56	75,18	75,80	76,43	77,05	
		Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	88	88,50	88,60	88,70	88,80	89	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembentukan Perda sebesar 20%	Pembentukan Perda sebesar 40%	Pembentukan Perda sebesar 60%	Pembentukan Perda sebesar 80%	Pembentukan Perda sebesar 100%

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan tahun 2025-2029 ditunjukkan oleh Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	

4

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab III, maka berdasarkan sasaran Sekretariat DPRD dalam periode tahun 2025-2029, program yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Program tersebut didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 yang dirinci pada tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.4.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan				Indeks Reformasi Birokrasi General		
		Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD		
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
			Meningkatnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Lancar		Persentase Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Ditetapkan		
				Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Lancar	Persentase Pengelolaan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terselesaikan	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
				Tersusunnya Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	

			Tersusunnya Hasil Kajian Dokumen Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			Tersusunnya Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	
			Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	
			Tersosialisasikannya Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
			<i>Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Proses Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD</i>	<i>Persentase Pengelolaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Proses Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD</i>	<i>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	
			Tersosialisasikannya Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
		Meningkatnya Penetapan Kebijakan Anggaran yang Lancar		Persentase Kebijakan Anggaran yang Ditetapkan		
			<i>Meningkatnya Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Lancar</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terselesaikan</i>	<i>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	
			Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	
			Tersusunnya Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Tersusunnya Dokumen Penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	
			Tersusunnya Dokumen Penetapan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	

			Tersusunnya Dokumen Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
		Meningkatnya Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Lancar		Persentase Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah yang Difasilitasi		
			<i>Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lancar</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pembahasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terselesaikan</i>	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Terawasinya Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			Terawasinya Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			Terawasinya Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			Terawasinya Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			Terawasinya Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			Tersusunnya Dokumen Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
		Meningkatnya Profesionalitas DPRD		Persentase Pengembangan Profesionalitas DPRD		
			<i>Meningkatnya Pengelolaan Kapasitas DPRD yang Lancar</i>	<i>Persentase Pengelolaan Kapasitas DPRD yang terselesaikan</i>	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	

			Tersedianya DPRD yang Berkompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	
			Terbinanya Kompetensi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			Tersusunnya Dokumen Kehumasan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			Terpublikasinya dan Terdokumentasinya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
		Meningkatnya Pembahasan Dokumen Rencana Kerja DPRD yang Lancar		Persentase Pembahasan Dokumen Rencana Kerja DPRD yang Ditetapkan		
			<i>Meningkatnya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPRD yang Lancar</i>	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPRD yang Terselesaikan</i>	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	
		Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti		
			<i>Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Persentase Pengelolaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Tersusunnya Dokumen Hasil Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	

		Meningkatnya Penegakan Kode Etik DPRD		Persentase Fasilitasi Penegakan Kode Etik DPRD yang Dievaluasi		
			<i>Meningkatnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Lancar</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terselesaikan</i>	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Tersusunnya Dokumen Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	
			Terawasinya Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	
		Meningkatnya Pembahasan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang Lancar		Persentase Pembahasan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang Dievaluasi		
			<i>Meningkatnya Fasilitasi Tugas DPRD yang Lancar</i>	<i>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terselesaikan</i>	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	
			Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
			Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			Tersusunnya Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
			Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

			<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah</i>	<i>Nilai SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			<i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah</i>	<i>Persentase Realisasi APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	

			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			<i>Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terselesaikan</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi</i>	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			<i>Meningkatnya Profesionalitas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			<i>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Yang Memadai</i>	<i>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi</i>	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<i>Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Jasa Operasional Kantor</i>	<i>Persentase Kebutuhan Layanan Jasa Operasional Kantor Yang Terpenuhi</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<i>Berfungsinya Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			<i>Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dalam Pengelolaan Gaji dan Tunjangan DPRD</i>	<i>Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan</i>	<i>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
			<i>Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan</i>	<i>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	
			Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
			Terfasilitasinya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
			<i>Meningkatnya Layanan Administrasi Fraksi DPRD</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Fraksi DPRD Yang Terpenuhi</i>	<i>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</i>	
			Terfasilitasinya Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD	
			<i>Meningkatnya Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi DPRD Yang Terpenuhi</i>	<i>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</i>	
			Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sekretariat DPRD				129.344.794.764		148.746.513.979		171.058.491.077		196.717.264.737		226.224.854.447	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				60.466.135.320		69.536.055.618		79.966.463.961		91.961.433.555		105.755.648.588	
	Persentase Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Ditetapkan	82,14	100	7.418.130.000	100	8.530.849.500	100	9.810.476.925	100	11.282.048.464	100	12.974.355.733	
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pengelolaan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terselesaikan	82,14	100	6.798.210.000	100	7.817.941.500	100	8.990.632.725	100	10.339.227.634	100	11.890.111.779	
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	12	4.099.496.000	12	4.714.420.400	13	5.421.583.460	14	6.234.820.979	15	7.170.044.126	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8	12	1.374.366.000	12	1.580.520.900	13	1.817.599.035	14	2.090.238.890	15	2.403.774.724	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	8	12	629.500.000	12	723.925.000	13	832.513.750	14	957.390.813	15	1.100.999.434	
Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	1	368.568.000	1	423.853.200	1	487.431.180	1	560.545.857	1	644.627.736	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	300	600	326.280.000	700	375.222.000	800	431.505.300	900	496.231.095	1.000	570.665.759	
<i>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Persentase Pengelolaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Proses Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>619.920.000</i>	<i>100</i>	<i>712.908.000</i>	<i>100</i>	<i>819.844.200</i>	<i>100</i>	<i>942.820.830</i>	<i>100</i>	<i>1.084.243.954</i>	
Sub Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	1500	1.200	619.920.000	1.200	712.908.000	1.300	819.844.200	1.400	942.820.830	1.500	1.084.243.954	
	Persentase Kebijakan Anggaran yang Ditetapkan	100	100	3.928.855.000	100	4.518.183.250	100	5.195.910.738	100	5.975.297.348	100	6.871.591.950	
<i>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Terselesaikan</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>3.928.855.000</i>	<i>100</i>	<i>4.518.183.250</i>	<i>100</i>	<i>5.195.910.738</i>	<i>100</i>	<i>5.975.297.348</i>	<i>100</i>	<i>6.871.591.950</i>	
Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	2	785.291.000	2	903.084.650	2	1.038.547.348	2	1.194.329.450	2	1.373.478.867	
Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	2	785.291.000	2	903.084.650	2	1.038.547.348	2	1.194.329.450	2	1.373.478.867	
Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	786.491.000	1	904.464.650	1	1.040.134.348	1	1.196.154.500	1	1.375.577.675	
Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	786.491.000	1	904.464.650	1	1.040.134.348	1	1.196.154.500	1	1.375.577.675	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	785.291.000	1	903.084.650	1	1.038.547.346	1	1.194.329.448	1	1.373.478.866	
	Persentase Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	100	100	4.100.284.560	100	4.715.327.244	100	5.422.626.331	100	6.236.020.280	100	7.171.423.322	
<i>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pembahasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terselesaikan</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>4.100.284.560</i>	<i>100</i>	<i>4.715.327.244</i>	<i>100</i>	<i>5.422.626.331</i>	<i>100</i>	<i>6.236.020.280</i>	<i>100</i>	<i>7.171.423.322</i>	
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	12	845.329.600	12	972.129.040	12	1.117.948.396	12	1.285.640.655	12	1.478.486.754	
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	12	487.329.600	12	560.429.040	12	644.493.396	12	741.167.405	12	852.342.516	
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	12	999.510.160	12	1.149.436.684	12	1.321.852.187	12	1.520.130.015	12	1.748.149.517	
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	12	897.929.600	12	1.032.619.040	12	1.187.511.896	12	1.365.638.680	12	1.570.484.482	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	12	487.329.600	12	560.429.040	12	644.493.396	12	741.167.405	12	852.342.516	
Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12	12	382.856.000	12	440.284.400	12	506.327.060	12	582.276.120	12	669.617.537	
	Persentase Pengembangan Profesionalitas DPRD	100	100	4.970.370.840	100	5.715.926.466	100	6.573.315.436	100	7.559.312.751	100	8.693.209.664	
<i>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Persentase Pengelolaan Kapasitas DPRD yang terselesaikan</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>4.970.370.840</i>	<i>100</i>	<i>5.715.926.466</i>	<i>100</i>	<i>6.573.315.436</i>	<i>100</i>	<i>7.559.312.751</i>	<i>100</i>	<i>8.693.209.664</i>	
Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	1	17.278.000	1	19.869.700	1	22.850.155	1	563.649.716	1	30.219.330	
Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	6	3.640.912.000	6	4.187.048.800	6	4.815.106.120	5	5.000.000.000	6	6.367.977.844	
Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	8	288.000.000	8	331.200.000	8	380.880.000	8	438.012.000	8	503.713.800	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	12	415.139.920	12	477.410.908	12	549.022.544	12	631.375.926	12	726.082.315	
Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6	12	609.040.920	12	700.397.058	12	805.456.617	12	926.275.109	12	1.065.216.375	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Pembahasan Dokumen Rencana Kerja DPRD yang Ditetapkan	100	100	350.000.000	100	402.500.000	100	462.875.000	100	532.306.250	100	612.152.188	
<i>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPRD yang terselesaikan</i>	100	100	350.000.000	100	402.500.000	100	462.875.000	100	532.306.250	100	612.152.188	
Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	20	272.000.000	25	312.800.000	30	359.720.000	35	413.678.000	40	475.729.700	
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2	2	78.000.000	2	89.700.000	2	103.155.000	2	118.628.250	2	136.422.488	
	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	100	15.037.212.000	100	17.292.793.800	100	19.886.712.870	100	22.869.719.801	100	26.300.177.771	
<i>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Persentase Pengelolaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	100	100	15.037.212.000	100	17.292.793.800	100	19.886.712.870	100	22.869.719.801	100	26.300.177.771	
Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	50	50	89.112.000	50	102.478.800	50	117.850.620	50	135.528.213	50	155.857.445	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	14.948.100.000	3	17.190.315.000	3	19.768.862.250	3	22.734.191.588	3	26.144.320.326	
	Persentase Fasilitas Penegakan Kode Etik DPRD yang Dievaluasi	100	100	2.286.570.000	100	2.629.555.500	100	3.023.988.825	100	3.477.587.149	100	3.999.225.221	
<i>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terselesaikan</i>	100	100	2.286.570.000	100	2.629.555.500	100	3.023.988.825	100	3.477.587.149	100	3.999.225.221	

BIDANG URUSAN / PROGRAM OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	1	462.414.000	1	531.776.100	1	611.542.515	1	703.273.892	1	808.764.976	
Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12	12	1.824.156.000	12	2.097.779.400	12	2.412.446.310	12	2.774.313.257	12	3.190.460.245	
	Persentase Pembahasan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang Dievaluasi	100	100	22.374.712.920	100	25.730.919.858	100	29.590.557.837	100	34.029.141.512	100	39.133.512.739	
<i>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terselesaikan</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>22.374.712.920</i>	<i>100</i>	<i>25.730.919.858</i>	<i>100</i>	<i>29.590.557.837</i>	<i>100</i>	<i>34.029.141.512</i>	<i>100</i>	<i>39.133.512.739</i>	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	76	130	15.032.245.000	150	17.287.081.750	175	19.880.144.013	200	22.862.165.614	250	26.291.490.457	
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	1	103.829.920	1	119.404.408	1	137.315.069	1	157.912.330	1	181.599.179	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	3.905.130.000	12	4.490.899.500	12	5.164.534.425	12	5.939.214.589	12	6.830.096.777	
Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48	48	3.333.508.000	48	3.833.534.200	48	4.408.564.330	48	5.069.848.979	48	5.830.326.326	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,67	76	68.878.659.444	78	79.210.458.361	80	91.092.027.115	82	104.755.831.182	84	120.469.205.859	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>69,85</i>	<i>75</i>	<i>289.143.200</i>	<i>76</i>	<i>332.514.680</i>	<i>77</i>	<i>382.391.882</i>	<i>78</i>	<i>439.750.664</i>	<i>79</i>	<i>505.713.264</i>	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4	79.989.200	5	91.987.580	5	105.785.717	6	121.653.575	6	139.901.611	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	29.795.200	1	34.264.480	1	39.404.152	1	45.314.775	1	52.111.991	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	29.795.200	1	34.264.480	1	39.404.152	1	45.314.775	1	52.111.991	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	29.795.200	1	34.264.480	1	39.404.152	1	45.314.775	1	52.111.991	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	29.795.200	1	34.264.480	1	39.404.152	1	45.314.775	1	52.111.991	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	9	89.973.200	10	103.469.180	12	118.989.557	12	136.837.989	12	157.363.689	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Realisasi APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	94,57	98	7.729.795.000	98	8.889.264.250	99	10.222.653.888	99	11.756.051.971	99	13.519.459.766	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	52	7.383.387.000	52	8.490.895.050	52	9.764.529.308	52	11.229.208.703	52	12.913.590.008	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	116.947.200	12	134.489.280	12	154.662.672	12	177.862.073	12	204.541.384	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	11.808.000	1	13.579.200	1	15.616.080	1	17.958.492	1	20.652.266	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	14	196.728.800	14	226.238.120	14	260.173.838	14	299.199.914	14	344.079.901	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	20.924.000	2	24.062.600	2	27.671.990	2	31.822.789	2	36.596.207	
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terselesaikan</i>	100	100	295.399.040	100	339.708.896	100	390.665.230	100	449.265.015	100	516.654.767	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	5	295.399.040	6	339.708.896	8	390.665.230	10	449.265.015	12	516.654.767	
<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>120.705.000</i>	<i>100</i>	<i>138.810.750</i>	<i>100</i>	<i>159.632.363</i>	<i>100</i>	<i>183.577.217</i>	<i>100</i>	<i>211.113.799</i>	
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	35.740.000	2	41.101.000	2	47.266.150	2	54.356.073	2	62.509.483	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	7	84.965.000	8	97.709.750	10	112.366.213	12	129.221.144	12	148.604.316	
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>75,22</i>	<i>80</i>	<i>3.531.894.000</i>	<i>80</i>	<i>4.061.678.100</i>	<i>80</i>	<i>4.670.929.815</i>	<i>80</i>	<i>5.371.569.287</i>	<i>80</i>	<i>6.177.304.680</i>	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	20	322.269.000	20	370.609.350	20	426.200.753	20	490.130.865	20	563.650.495	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	40	1.046.280.000	50	1.203.222.000	60	1.383.705.300	70	1.591.261.095	80	1.829.950.259	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38	150	2.163.345.000	150	2.487.846.750	150	2.861.023.762	150	3.290.177.327	150	3.783.703.926	
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>77,75</i>	<i>88,50</i>	<i>5.394.369.988</i>	<i>88,60</i>	<i>6.203.525.487</i>	<i>88,70</i>	<i>7.134.054.310</i>	<i>88,80</i>	<i>8.204.162.455</i>	<i>89</i>	<i>9.434.786.824</i>	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	10	199.997.000	10	229.996.550	10	264.496.033	10	304.170.437	10	349.796.003	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	15	450.040.000	15	517.546.000	15	595.177.900	15	684.454.585	15	787.122.773	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11	15	450.000.000	15	517.500.000	15	595.125.000	15	684.393.750	15	787.052.813	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	399.960.000	2	459.954.000	2	528.947.100	2	608.289.165	2	699.532.540	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	1.064.478.000	2	1.224.149.700	2	1.407.772.155	2	1.618.937.978	2	1.861.778.675	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	36	249.900.000	36	287.385.000	36	330.492.750	36	380.066.663	36	437.076.662	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	2.499.903.000	24	2.874.888.450	24	3.306.121.717	24	3.802.039.975	24	4.372.345.970	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	12	80.091.988	12	92.105.787	12	105.921.655	12	121.809.902	12	140.081.388	
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>9.280.028.001</i>	<i>100</i>	<i>10.672.032.201</i>	<i>100</i>	<i>12.272.837.031</i>	<i>100</i>	<i>14.113.762.586</i>	<i>100</i>	<i>16.230.826.974</i>	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	15	382.428.000	17	439.792.200	17	505.761.030	17	581.625.185	17	668.868.962	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	4	3.800.000.000	5	4.370.000.000	5	5.025.500.000	5	5.779.325.000	5	6.646.223.750	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	15	718.720.000	15	826.528.000	15	950.507.200	15	1.093.083.280	15	1.257.045.772	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	170	2.583.880.001	200	2.971.462.001	300	3.417.181.301	400	3.929.758.497	500	4.519.222.271	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	20	1.795.000.000	20	2.064.250.000	20	2.373.887.500	20	2.729.970.624	20	3.139.466.219	
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Kebutuhan Layanan Jasa Operasional Kantor Yang Terpenuhi</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>1.777.885.840</i>	<i>100</i>	<i>2.044.568.716</i>	<i>100</i>	<i>2.351.254.023</i>	<i>100</i>	<i>2.703.942.127</i>	<i>100</i>	<i>3.109.533.446</i>	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12.000.000	12	13.800.000	12	15.870.000	12	18.250.500	12	20.988.075	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49	60	666.682.000	60	766.684.300	60	881.686.945	60	1.013.939.987	60	1.166.030.985	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	60	1.099.203.840	60	1.264.084.416	60	1.453.697.078	60	1.671.751.640	60	1.922.514.386	
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>2.832.660.000</i>	<i>100</i>	<i>3.257.559.000</i>	<i>100</i>	<i>3.746.192.850</i>	<i>100</i>	<i>4.308.121.778</i>	<i>100</i>	<i>4.954.340.044</i>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	18	502.160.000	18	577.484.000	18	664.106.600	18	763.722.590	18	878.280.979	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	16	404.000.000	16	464.600.000	16	534.290.000	16	614.433.500	16	706.598.525	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	500	488.500.000	500	561.775.000	500	646.041.250	500	742.947.438	500	854.389.553	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	20	1.438.000.000	20	1.653.700.000	20	1.901.755.000	20	2.187.018.250	20	2.515.070.987	
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	100	100	34.838.879.375	100	40.064.711.281	100	46.074.417.973	100	52.985.580.669	100	60.933.417.770	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	34.838.879.375	50	40.064.711.281	50	46.074.417.973	50	52.985.580.669	50	60.933.417.770	
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	88	100	862.500.000	100	991.875.000	100	1.140.656.250	100	1.311.754.688	100	1.508.517.891	
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	6	712.500.000	8	819.375.000	8	942.281.250	8	1.083.623.438	8	1.246.166.953	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	38	50	150.000.000	50	172.500.000	50	198.375.000	50	228.131.250	50	262.350.938	
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Fraksi DPRD Yang Terpenuhi	100	100	281.800.000	100	324.070.000	100	372.680.500	100	428.582.575	100	492.869.961	
Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8	8	281.800.000	8	324.070.000	8	372.680.500	8	428.582.575	8	492.869.961	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<i>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi DPRD Yang Terpenuhi</i>	91,43	100	1.643.600.000	100	1.890.140.000	100	2.173.661.000	100	2.499.710.150	100	2.874.666.673	
Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	32	80	1.643.600.000	80	1.890.140.000	80	2.173.661.000	80	2.499.710.150	80	2.874.666.673	

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Pembentukan Peraturan Perundangan yang Lancar	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	
			Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
		Meningkatnya Penetapan Kebijakan Anggaran yang Lancar	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	
			Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD	
			Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	
			Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
		Meningkatnya Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Lancar	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
		Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Poin	88,00	88,50	88,60	88,70	88,80	89,00	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Ket : Sekretariat DPRD tidak memiliki indikator kinerja kunci

5

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Cianjur. Sekretariat DPRD merupakan mitra kerja antara eksekutif dengan legislatif serta masyarakat, sehingga diharapkan dapat terjalin kerjasama yang sinergi dan harmonis. Dengan demikian, proses pembangunan di Kabupaten Cianjur dapat berjalan sebagaimana mestinya serta hasilnya dapat dirasakan/ dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Cianjur. Proses pembangunan diawali dengan perencanaan secara sinergis selama kurun waktu lima tahun yang disusun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029. Adapun sasaran Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD. Untuk mengimplementasikan Renstra, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Renstra dijabarkan melalui penyusunan Renja setiap tahun
- b. Hasil pelaksanaan Renstra dievaluasi setiap tahun melalui penyusunan evaluasi Renstra
- c. Hasil evaluasi Renstra dikoordinasikan kepada setiap pelaksana kegiatan untuk memperoleh solusi yang dapat ditempuh dalam perbaikan atau peningkatan kinerja

Renstra merupakan acuan yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan program kerja yang telah ditetapkan. Berbagai hal yang dimuat di dalam Renstra merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mencapai target sasaran guna mendukung terwujudnya visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Cianjur yakni Cianjur Berjaya (Beragama, Sejahtera, Berkarya).

Cianjur, 12 September 2025

**Sekretariat DPRD Kab. Cianjur
Sekretaris,**



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690304 199503 1 007

LAMPIRAN

Data Sektoral Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur
Tahun 2020-2025

Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
4.02.000001	Dokumentasi DPRD	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.2.04.0008] [4.02.02.1.04.0008]
4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang					720	1125	500	1000	1500	200	T	[4.02.02.1.05.0004] [4.02.02.2.05.0004]
4.02.000004	Publikasi DPRD	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.2.04.0008] [4.02.02.1.04.0008]
4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen					2	3	2	2	3	4	T	[4.02.02.1.05.0004] [4.02.02.2.05.0004]
4.02.000006	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen					1	1	1	1	1	1	T	[4.02.02.2.04.0008] [4.02.02.1.04.0008]
4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen					1	1	1	1	1	1	T	[4.02.02.1.01.0001] [4.02.02.2.01.0001]
4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen					8	10	5	8	8	8	T	[4.02.02.1.01.0002]
4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen					0	0	5	8	8	8	T	[4.02.02.1.01.0003] [4.02.02.2.01.0003]
4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen					8	10	5	8	8	8	T	[4.02.02.1.01.0004] [4.02.02.2.01.0004]
4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen					0	0	0	0	0	1	T	[4.02.02.1.01.0005] [4.02.02.2.01.0005]
4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang					200	300	160	0	300	0	T	[4.02.02.1.01.0006] [4.02.02.2.01.0006]
4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen					2	2	2	2	2	2	T	[4.02.02.1.02.0001] [4.02.02.2.02.0001]

Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen					2	2	2	2	2	2	T	[4.02.02.1.02.0002] [4.02.02.2.02.0002]
4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen					1	1	1	1	1	1	T	[4.02.02.1.02.0003] [4.02.02.2.02.0003]
4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen					1	1	1	1	1	1	T	[4.02.02.1.02.0004]
4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.1.02.0005] [4.02.02.2.02.0005]
4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen					1	1	1	1	1	1	T	[4.02.02.1.02.0006] [4.02.02.2.02.0006]
4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan					0	0	12	12	12	12	T	[4.02.02.1.03.0001] [4.02.02.2.03.0001]
4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan					0	0	12	12	12	12	T	[4.02.02.1.03.0002] [4.02.02.2.03.0002]
4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan					0	0	12	12	12	12	T	[4.02.02.1.03.0003] [4.02.02.2.03.0003]
4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan					0	0	12	12	12	12	T	[4.02.02.1.03.0004] [4.02.02.2.03.0004]
4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan					0	0	12	12	12	12	T	[4.02.02.1.03.0005] [4.02.02.2.03.0005]
4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.1.03.0006] [4.02.02.2.03.0006]
4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.1.03.0007] [4.02.02.2.03.0007]

Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen					1	1	1	1	1	1	T	[4.02.02.1.03.0008] [4.02.02.2.03.0008]
4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen					0	0	0	0	1	1	T	[4.02.02.1.04.0001] [4.02.02.2.04.0001]
4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen					6	6	6	6	5	6	T	[4.02.02.1.04.0002] [4.02.02.2.04.0002]
4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang					4	4	8	13	12	22	T	[4.02.02.1.04.0004] [4.02.02.2.04.0004]
4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang					8	8	8	8	8	8	T	[4.02.02.1.04.0005] [4.02.02.2.04.0005]
4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen					12	12	12	12	12	12	T	[4.02.02.1.04.0006] [4.02.02.2.04.0006]
4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen					1	1	1	1	2	2	T	[4.02.02.1.04.0007] [4.02.02.2.04.0007]
4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen					4	4	5	6	6	6	T	[4.02.02.1.04.0008] [4.02.02.2.04.0008]
4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan					288	152	4	9	0	0	T	[4.02.02.1.05.0001] [4.02.02.2.05.0001]
4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen					50	50	50	50	50	50	T	[4.02.02.1.05.0002] [4.02.02.2.05.0002]
4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen					3	3	3	3	2	3	T	[4.02.02.1.05.0003] [4.02.02.2.05.0003]
4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen					0	0	0	0	0	1	T	[4.02.02.1.06.0001] [4.02.02.2.06.0001]
4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan					0	0	12	12	12	12	T	[4.02.02.1.06.0002] [4.02.02.2.06.0002]
4.02.000040	Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.1.07.0001] [4.02.02.2.07.0001]

Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
4.02.000041	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.1.07.0002] [4.02.02.2.07.0002]
4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen					92	144	67	83	76	53	T	[4.02.02.1.08.0001] [4.02.02.2.08.0001]
4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan					1	1	1	1	1	1	T	[4.02.02.1.08.0002] [4.02.02.2.08.0002]
4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen					0	0	12	12	12	12	T	[4.02.02.1.08.0003] [4.02.02.2.08.0003]
4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen					0	0	48	48	48	48	T	[4.02.02.1.08.0004] [4.02.02.2.08.0004]
4.02.000046	Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.1.08.0005] [4.02.02.2.08.0005]
4.02.000047	Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.03.3.01.0001] [4.02.05.4.01.0006]
4.02.000048	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.03.3.01.0002]
4.02.000049	Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.03.3.01.0003] [4.02.05.4.01.0007]
4.02.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.03.3.01.0004] [4.02.05.4.01.0008]
4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.2.01.0002]
4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen					0	0	0	0	0		T	[4.02.02.2.02.0004]